

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA  
ANTARA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN MITRA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**BRAMANTYA YUDHISTIRA**  
**C100160050**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN MITRA**

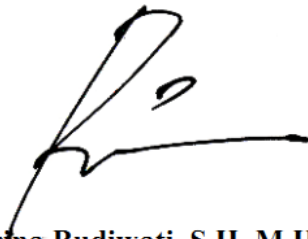
**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh :

**BRAMANTYA YUDHISTIRA**  
**C100160050**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

**(Septarina Budiwati, S.H.,M.H., C.,N)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN MITRA**

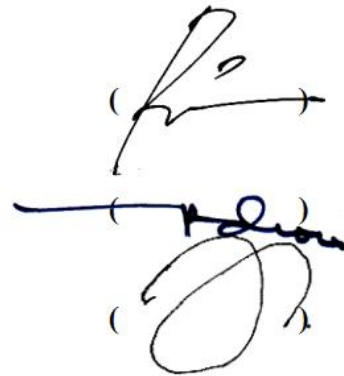
**OLEH**

**BRAMANTYA YUDHISTIRA  
C100160050**

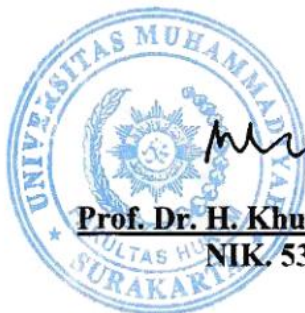
**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C., N  
Ketua Dewan Penguji
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
Sekretaris Dewan Penguji
3. Darsono., S.H., M.H  
Anggota Dewan Penguji



**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juni 2021

Penulis



**BRAMANTYA YUDHISTIRA**

**C100160050**

## **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN MITRA**

### **Abstrak**

Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra membahas mengenai adanya hubungan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada masa pandemi Covid-19 dan penyelesaian apabila terjadi sebuah problematika atau masalah antara kedua belah pihak. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian hubungan hukum dan pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1313, 1320, 1338, dan 1601 KUHPerdara yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian antara Kantor Akuntan WARTONO & REKAN dengan PT. Mega Kharisma Packindo, wanprestasi telah di selesaikan dengan Musyawarah Mufakat.

**Kata Kunci:** pelaksanaan kontrak kerja, akuntan publik, hubungan hukum

### **Abstract**

The implementation of the Work Contract between the Public Accounting Firm and the Partner discusses the existence of a legal relationship, namely the rights and obligations that must be carried out by both parties during the Covid-19 pandemic and the resolution if there is a problem or problem between the two parties. The method used by the author is empirical juridical, namely by conducting studies and processing of research data on legal relations and the implementation of work contracts between Public Accounting Firms and Partners during the Covid-19 pandemic. The results that can be concluded from this study are that the legal relationship between the two parties is in accordance with the provisions of Articles 1313, 1320, 1338, and 1601 of the Civil Code which gives rise to rights and obligations that must be carried out by both parties. In implementing the agreement between WARTONO & REKAN Accounting Firm and PT. Mega Kharisma Packindo, the default has been resolved by consensus meeting.

**Keywords:** employment contract implementation, public accountant, legal relations

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan Hukum Industri yang berbasis nilai-nilai ke islaman pula telah mempermudah manusia untuk memenuhi segala hal dengan cara yang halal dan legal. Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Fakultas Hukum

Univeraitas Muhammadiyah Surakarta, mengembangkan segala sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum di bidang industri berbasis nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan. Oleh karena itu terciptalah sistem sistem baru guna memenuhi kebutuhan manusia khususnya untuk bisa menganalisis/mengkaji/mengetahui pelaksanaan kontrak kerja yang terjadi antara Kantor Akuntan Publik dengan mitranya.

Jasa Akuntan Publik berperan di dunia usaha dalam memberi kualitas informasi keuangan, data keuangan dan data ekonomi. Data keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi persaingan usaha di era industri saat ini. Modal yang di keluarkan oleh pengusaha dalam menjalankan perusahaan harus mendapatkan pengawasan atau pengendalian, karena itu akuntan publik bekerja memberikan jasanya yaitu laporan keuangan kepada perusahaan yang disini disebut sebagai mitra.

Dengan demikian profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan publik memastikan tidak ada penyelewengan, manipulasi, tindakan yang menyimpang dan penyalahgunaan sumber daya di suatu perusahaan atau lembaga dan seorang akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar bisa mengaudit laporan keuangan dan berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan serta mendorong peningkatan *good corporate governance*.

Dapat di pahami bahwa dalam pemberian jasa oleh Akuntan Publik kepada Mitra, Akuntan Publik dan pengguna jasanya melakukan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi lalu menerbitkan perikatan perikatan. Kontrak kerja atau Perjanjian kerja yang telah di buat merupakan tuntutan profesi Akuntan Publik, sebab ketika seorang Akuntan Publik bertugas menjalankan usahanya Akuntan Publik di tuntutan untuk membuat suatu

perjanjian kerja dengan mitranya yang kemudian dari perjanjian itu saling mengikat satu sama lain dan perjanjian tersebut berlaku sesuai jangka waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak. Tentunya perikatan yang mereka lakukan dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak tertulis sebagai tanda kesepakatan. Dengan adanya kontrak maka pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi.

Prestasi perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik adalah jasa, yang cara pelaksanaannya dengan berbuat sesuatu (Muru, 2013). Akuntan Publik mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu (melaksanakan jasa) sedangkan pengguna jasa akuntan publik berhak atas sesuatu (jasa) tersebut. Jika mengacu pada perjanjian maka akuntan publik yang dalam melakukan jasanya melakukan wanprestasi maka akuntan publik (pihak wanprestasi) tersebut harus menanggung akibat dari tuntutan pihak pengguna jasa akuntan publik yang dapat berupa tuntutan pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan tuntutan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) (Muru, 2013).

Pada masa pandemi covid-19 di awal tahun 2020 banyak pihak yang terkena dampak ekonomi. Hal ini tentunya sangat merugikan banyak pihak terutama Kantor Akuntan Publik dan pengguna jasa Akuntan Publik yang terkena dampak ekonomi. Hal ini tentu saja merugikan sangat Akuntan Publik karna sebelumnya kedua pihak sudah terikat dalam suatu kontrak kerja selama satu tahun kedepan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah mengenai efektivitas pelaksanaan kontrak kerja dilakukan oleh Mitra Kantor Akuntan publik dimana tidak sesuai dengan yang terdapat di KUHPdata tentang syarat syarat perjanjian. Ini tentu saja sangat merugikan Akuntan Publik sebagai penyedia jasa ansurans karena Mitra sudah melanggar Kontrak Kerja yang sudah di sepakati di awal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hubungan Hukum dalam kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra dan bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dan Mitra pada masa pandemic Covid-19?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk melihat dan mengetahui Hubungan Hukum dalam kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik

dengan Mitra dan pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dan Mitra pada masa pandemic Covid-19. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum perjanjian yang berkaitan dengan pembuatan kontrak kerjasama pada saat masa pandemi covid-19 dan secara praktis adalah menjadi dasar acuan data guna penelitian yang lebih mendalami terkait permasalahan yang sama juga memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelesaian perkara perdata mengenai perjanjian kontrak kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dan Mitra.

## **2. METODE**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hubungan Hukum dalam Kontrak Kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 5 April 2021 di Graha NINO, JL. A. Yani No. 335, Manahan, Solo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN sebagai penyedia jasa Audit atas Laporan Keuangan, maka hubungan hukum dalam kontrak kerja di dasarkan atas perjanjian yang di buat dan di sepakati oleh para pihak. Bahwa Perjanjian yang di buat antara Chandra Setiawan Ham. sebagai Direktur PT. Mega Kharisma Packindo sebagai mitra pengguna jasa akuntansi dengan Drs. Wartono, M.Si., Akt.,CPA., CA sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN sebagai penyedia jasa akuntansi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1313 KUHPperdata. Perjanjian diatas merupakan perjanjian kerja yang mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1601 KUHPperdata dalam hal ini perjanjian yang di lakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Mitra merupakan perjanjian kerja



jasa tertentu dimana Akuntan Publik sebagai penyedia jasa akuntansi memberikan jasanya yang berupa pengolahan data laporan keuangan kepada mitra.

Bahwa Perjanjian yang di buat antara Chandra Setiawan Ham. sebagai Direktur PT. Mega Kharisma Packindo sebagai mitra pengguna jasa akuntansi dengan Drs. Wartono, M.Si., Akt.,CPA., CA sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN sebagai penyedia jasa akuntansi telah dibuat secara sah sesuai dengan syarat - syarat dan ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

Berikut para pihak yang melakukan perjanjian kontrak kerja : Chandra Setiawan Ham sebagai Direktur PT. Mega Kharisma Packindoyang beralamat di Jl. Industri No.002 Rt 002 Rw 003 Telukan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang bertindak selaku jabatannya untuk dan atas nama PT. Mega Kharisma Packindo Selanjutnya dalam perjanjian di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Drs. Wartono, M.Si., Akt., CPA., CA.. selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN yang beralamat di Graha NINO, JL. A. Yani No. 335, Manahan, Solo yang bertindak selaku jabatannya untuk dan atas nama kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN sebagai penyedia jasa akuntansi dalam perjanjian ini, yang selanjutnya dalam perjanjian di sebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menurut pemaparan diatas, perjanjian kontrak kerja ini telah memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu adanya subjek yang melakukan perjanjian. Kecakapan yang di maksud dalam pasal 1320 KUHPer yaitu mereka yang berumur 21 tahun, atau belum berumur 21 tahun tapi telah kawin atau pernah menikah. bahwa para pihak dalam perjanjian kerja ini yaitu pihak pertama Chandra Setiawan Ham telah berumur 55 tahun saat perjanjian tersebut di buat dan di tandatangani, sedangkan pihak kedua yaitu Drs. Wartono, M.Si., Akt., CPA., CA. telah berumur 58 tahun saat perjanjian tersebut di buat dan di tandatangani pada tahun 2020. Hal ini telah memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian kontrak kerja tersebut, yang mana subjek dalam perjanjian tersebut sudah cakap umur untuk melakukan pernjajian.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian kontrak kerja yang di teliti oleh penulis telah sesuai dan sudah memenuhi syarat objektif dari sebuah perjanjian. Objek yang di perjanjikan dalam perjanjian kontrak kerja antara PT. Mega Kharisma Packindo selaku pihak dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN adalah jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik berupa jasa general audit atas laporan keuangan dari PT. Mega Kharisma Packindo. Suatu hal yang di maksud dalam perjanjian di atas yaitu audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja antara PT. Mega Kharisma Packindo selaku pihak pertama sebagai pengguna jasa akuntan dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN pihak kedua sebagai pemberi jasa akuntan telah sesuai dengan Pasal 1337 KUHPdata. Hal tersebut sesuai dengan isi perjanjian kontrak kerja PT. Mega Kharisma Packindo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN karena merupakan causa yang halal dan tidak mengganggu norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian Kontrak Kerja yang di buat antara PT. Mega Kharisma Packindo sebagai mitra pengguna jasa akuntan dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN sebagai pemberi jasa akuntan telah di buat secara sah, dengan demikian hal tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang ada di dalam perjanjian kontrak kerja. Hak dan kewajiban yang timbul wajib di penuhi oleh para pihak yang ada di dalam perjanjian kontrak kerja, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1338 KUHPdata dan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan pertauran perundang – undangan yang berlaku.

### **3.2 Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Kantor Akuntan Publik dan Mitra**

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis terhadap perjanjian kontrak kerja antara PT. Mega Kharisma Packindo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN penulis mendapat beberapa dataa dalam pelaksanaan kontrak kerja yang telah dibuat dan di setujui oleh kedua belah pihak pada 03-08-2020 (tiga agustus dua ribu dua puluh) untuk melaksanakan pemeriksaan umum (general audit) atas laporan keuangan. Adapun pelaksanaan perjanjian kerja antara PT.

Mega Kharisma Packindo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN sebagai berikut :

#### 1.1.1 Para Pihak

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra di dalamnya terdapat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa PT. Mega Kharisma Packindo yang diwakili oleh Chandra Setiawan Ham. selaku Direktur disebut sebagai kreditur, karena pada dasarnya pihak kreditur merupakan pihak yang menuntut hak dari apa yang di laksanakan atau yang telah menjadi kewajiban dari debitur itu sendiri, dimana PT. Mega Kharisma Packindo berhak menuntut WARTONO & REKAN sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan umum (general audit) atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN yang diwakili oleh pimpinannya yaitu Drs. Wartono, M.Si., Akt., CPA., CA. adalah Pihak Debitur karena Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN adalah Pihak yang berkewajiban untuk memberikan jasanya melakukan pemeriksaan umum (general audit) atas laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata tentang syarat terjadinya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak.

#### 1.1.2 Jenis Pekerjaan

Dalam pelaksanaan perjanjian Audit atas laporan keuangan, PT. Mega Kharisma Packindo selaku Pihak Pertama membutuhkan jasa dari Pihak Kedua yaitu Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN untuk melakukan pemeriksaan umum (general audit) atas laporan keuangan dari perusahaan PT. Kharisma Packindo. Hal tersebut di buat sesuai dengan Standar Profesi Akuntan publik dan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pemberian jasa yang di lakukan pihak kedua telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) huruf a yang berbunyi “memberikan jasa Audit atas informasi laporan keuangan historis” dan pasal 3 ayat (2) “jasa asurans sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Dalam pelaksanaan terkait dengan jenis pekerjaan yaitu berupa jasa yang diberikan telah sesuai dengan apa yang di perjanjikan.

#### 1.1.3 Waktu Pekerjaan

Dalam mengerjakan Audit Pihak Kedua tidak mengalami kendala dan audit atas laporan keuangan dapat di kerjakan dan di selesaikan dalam kurun waktu 3 bulan dan hasil dari pemeriksaan umum (general audit) atas laporan keuangan PT. Mega Kharisma Packindo dapat di serahkan dengan tepat waktu, hal ini telah sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan. Dalam pasal 2 akta perjanjian tertulis bahwa “Dalam melaksanakan pekerjaan ini PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Perjanian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak”.

#### 1.1.4 Kelancaran Pekerjaan

Dalam pelaksanaan perjanjian Audit atas laporan keuangan antara PT. Mega Kharisma Packindo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN ini staff dari Pihak Pertama telah memberikan data - data dan dokumen terkait informasi keuangan dari perusahaan kepada Pihak Kedua demi kelancaran pengerjaan audit atas laporan keuangan PT. Mega Kharisma Packindo hal ini telah sesuai dengan isi dari pasl 3 perjanjian ini, dan juga telah sesuai dengan Pasal 24 huruf c Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Akuntan Publik.

#### 1.1.5 Kearahasiaan Dokumen

Dalam pelaksanaan perjanjian Audit atas laporan keuangan, Pihak Kedua saat melakukan tugasnya dengan hati - hati menjaga kerahasiaan dokumen- dokumen dan informasi dari persuhaan agar tidak tersebar ke Pihak Ketiga di luar perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan Audit atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik Pihak Kedua dilarang menyebarkan data, dokumen dan informasi keuangan dari perusahaan yang menjadi kliennya hal ini sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (3), Pasal 4 di dalam akta perjanjian, juga juga telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu “Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien.”

#### 1.1.6 Honorarium dan Cara Pembayaran

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Mega Kharisma Packindo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN mbayaran atas jasa

Audit laporan keuangan dilakukan dengan 2 metode pembayaran, hal ini telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kemudian 50% atau sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai pembayaran termin ke - 1 (pertama), akan dibayarkan pada saat Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan 50% sisanya, atau sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai pembayaran termin ke - 2 (final), akan dibayarkan saat penugasan selesai dan Laporan Hasil Audit diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

#### 1.1.7 Lain – Lain

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja Audit atas laporan keuangan ada beberapa hal yang diatur dalam pasal 6 perjanjian ini terutama pada ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang dijelaskan bahwa Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat akan di selesaikan secara musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dari Kantor Akuntan Publik permasalahan yang muncul disebabkan oleh adanya kondisi Pandemi Covid - 19 yang terjadi pada tahun 2020. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian audit laporan keuangan adalah karena Pihak Pertama tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang ada dalam perjanjian kerja pemeriksaan umum (general audit) laporan keuangan dimana Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 tentang Honorarium dan Cara Pembayaran. Perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama termasuk dalam perbuatan Wanprestasi, selanjutnya penulis akan menguraikan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pihak Pertama telah melakukan wanprestasi karna telah melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dan juga telah melanggar ketentuan Pasal 24 huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yaitu “Akuntan Publik berhak menerima imbalan atas jasa” dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan apa yang di perjanjikan pada pasal 5.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian audit laporan keuangan tersebut terjadi pada saat Pandemi Covid - 19 di Indonesia, sehingga wanprestasi di sebabkan karena PT. Mega Kharisma Packindo mengalami kesulitan ekonomi di karenakan banyak daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini menyebabkan pengiriman barang yang di lakukan PT, Mega Kharisma Packindo kepada konsumen menjadi terhambat sehingga dari adanya masalah eksternal yang di alami PT. Mega Kharisma Packindo karena adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSBB) saat Pandemi Covid - 19 sangat mempengaruhi omset perusahaan. Hal ini yang menyebabkan pembayaran termin ke - 2 yaitu sebesar Rp. 11,000.000,00 (sebelas juta rupiah) dilakukan tidak tepat waktu yang mana telah melanggar isi perjanjian yang terdapat pada pasal 5 perjanjian tersebut. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dengan di terbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional tidak serta merta membuat status bencana nasional dijadikan alasan pelanggaran tersebut menjadi perbuatan overmatch/keadaan memaksa seperti yang dialami oleh PT. Mega Kharisma Packindo karna perusahaannya terdampak oleh adanya Pandemi Covid - 19.

Dalam pelaksanaan pernjajian kontrak kerja antara PT. Mega Kharisma Packindo dengan Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN roses penyelesaian wanprestasi dapat di selesaikan dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (4). Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian melalui musyawarah di pilih agar mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan adanya musyawarah secara kekeluargaan para pihak dapat menawarkan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi para pihak yang melakukan wanprestasi hal ini telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3). Dalam musyarawah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh kedua belah pihak melahirkan kesepakatan bagi kedua pihak, yaitu: Pihak

pertama melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.000.000,00 yang di lunasi setelah selesai diadakannya musyawarah, pembayaran dilakukan pada hari Senin, 01 Maret 2021, pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai.

Setelah diadakannya musyawarah pada hari Senin, 01 Maret 2021, tercetus sebuah solusi, Jika Pihak Pertama mengalami masalah internal di perusahaannya terutama karena adanya keadaan kahar yang berdampak pada masalah keuangan pada internal perusahaan, untuk segera mengkonfirmasi keadaan tersebut kepada Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN.

Apabila dalam keadaan seperti yang dijabarkan di point nomor 2 tidak di lakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN dapat mengganggu proses pembayaran jasa Audit, yang menimbulkan kerugian bagi Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN.

Jika tidak ada konfirmasi dari PT. Mega Kharisma Packindo mengenai keadaan kahar yang dialami Pihak Pertama, maka pembayaran Audit atas jasa laporan keuangan harus tetap dilakukan sesudah hasil Audit di berikan kepada Pihak pertama, dan jika mengalami keterlambatan pembayaran maka Pihak Pertama akan di kenakan sanksi/denda oleh Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan bersama dalam musyawarah.

Perbuatan yang di lakukan oleh Pihak Pertama dapat di kenakan sanksi oleh pihak kedua sebagai pihak yang dirugikan, tetapi musyawarah lebih di kedepankan dalam penyelesaian masalah sehingga dapat memberikan solusi dan berbagai opsi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara mengenai keadaan memaksa tersebut perbuatan yang di lakukan oleh PT. Mega Kharisma Packindo tidak dapat di masukkan kedalam kategori overmatch/force Majeurre/Keadaan Memaksa karena perjanjian dibuat saat masa Pandemi Covid - 19 yang berarti kedua belah pihak telah sepatat dan siap melaksanakan perjanjian dengan keyakinan penuh dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing - masing. Jika pihak pertama mengalami kendala dalam pembayaran maka dapat di komunikasikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan audit atas laporan keuangan yang di kerjakan oleh

kantor akuntan publik selesai di kerjakan agar permasalahan yang tengah di hadapi oleh Pihak Pertama dapat menemui titik terang bagi kedua belah pihak dan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) tidak dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan overmatch/force Majeurre/Keadaan Memaksa walaupun Pandemi Covid - 19 sebagai bencana non alam namun hal itu tidak secara otomatis membatalkan kewajiban atau tidak di penuhannya prestasi oleh para pihak, hal ini di tegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdato.

Yang bisa dilakukan terhadap penyelesaian masalah wanprestasi yang di lakukan oleh PT. Mega Kharisma Packindo adalah dengan melakukan negosiasi ulang terhadap isi perjanjian untuk memenuhi kewajiban PT. Mega Kharisma Packindo yang telah melakukan wanprestasi tentunya sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPerdato pada ayat 3 dimana perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik untuk memenuhi yang menjadi hak dan kewajibannya para pihak.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Hubungan Hukum antara Kantor Akuntan Publik WARTONO & REKAN dengan PT. Mega Kharisma Packindo didahului dengan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 081.22/WR.01/KP.SPK/IX/2020 telah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdato dan Pasal 1601 KUHPerdato. Dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak secara sah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato. Perjanjian Kerja ini juga telah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato yang mana menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi yaitu Pihak Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai dengan termin yang telah di sepakati dalam perjanjian. Alasan Pihak Pertama tidak melaksanakan



kewajibannya yaitu dikarenakan perusahaannya terdampak oleh adanya Pandemi Covid - 19.

Dari kesimpulan penelitian tentang pelaksanaan Kontrak Kerja maka penulis menyimpulkan solusi dari permasalahan di atas yang berkaitan dengan wanprestasi yaitu Para Pihak melakukan pertemuan untuk bermusyawarah dengan tujuan mencapai mufakat dari kedua belah pihak yang berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi, karena wanprestasi tersebut terjadi akibat adanya pandemic covid-19 yang mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan termin, hal tersebut sesuai dengan pasal yang ada di dalam akta perjanjian yang intinya menyebutkan bahwa jika terdapat perselisihan maka akan dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian antara Kantor Akuntan WARTONO & REKAN dengan PT. Mega Kharisma Packindo, wanprestasi telah di selesaikan dengan Musyawarah Mufakat.

#### **4.2 Saran**

Dari pembahasan dan penjelasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: Diharapkan para pihak yang akan membuat suatu kontrak mengenai penggunaan suatu jasa diharapkan lebih memperhatikan aspek-aspek hukum yang akan dituangkan dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan hukum terkait apa yang akan diperjanjikan.

Diharapkan para pihak yang melakukan perjanjian memasukkan klausul tentang penyelesaian masalah apabila sedang mengalami keadaan kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban.

Diharapkan para pihak yang melaksanakan perjanjian apabila mengalami kendala atau masalah dalm melaksanakan perjanjian para pihak mengedepankan penyelesaian masalah secara non litigasi yaitu dengan cara negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru diantara para pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Diakses pada tanggal 4 september 2020

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekertaris Jenderal Kementerian  
Keuangan, Hlm.1. [www.ppajp.depkeu.go.id](http://www.ppajp.depkeu.go.id) diakses tanggal 4  
september 2020

Miru, Ahmadi. (2013). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT  
Raja Grafindo Persada.